

Analisis Implementasi Kebijakan Ketransmigrasian di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Periode 2009-2014

Achluddin Ibnu Rochim¹, V. Rudy Handoko²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Research titled "**Policy Implementation of Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2013 about Transmigration implementing to Settlement Units in Tanjung Buka, Bulungan, North Borneo 2009-2014 Periode**", motivated by a policy of democratization and decentralization of development post-Orde Baru in Indonesia. Policies that result in deregulation in all sectors of the Indonesian government is bringing new value changes in the bureaucracy and the public. The potential for conflict of interest, the social and the clash of value systems in recipient community development agents and different backgrounds gave dynamics consequence such as a conflict between migrants with the local population. In practice there is ambivalence policy sector development transmigration, on one side of Pancasila as the ideal basic, the Undang-Undang 1945 contains the values of National unity and togetherness becomes the basis for public policy itself, but on the other hand precisely into contention for the benefit of the Local Government following each value, traditions and culture of different peoples. A discrepancy between the situation of communities and local government conditions sender with the community and the local government transmigration, formulated: 1.How is the Implementation of Transmigration Sector Development Policy in East Java Province, 2.How to model the Implementation of Transmigration Sector Development Policy in East Java Province. Design methods of research used a qualitative descriptive data mining technique documents, interviews, and observations to the location of transmigration. The theoretical basis for the analysis of the implementation of public policy is Van Mater and Van Horn, where the performance implementation supported by five factors (1) standards and policy goals; (2) the resource; (3) strengthening the communication between organizations and activities; (4) the characteristics of the implementing agency; and (5) social, economic and political condition (6) Implementer Disposition. The findings of this research are the Implementation of Transmigration Sector Development Policy in East

Java Province successfully because it is based on strategic goals or objectives transmigration fields, and the standard form of Key Performance Indicators of the field of transmigration. Support transmigration of human resources and non-human resources. Communication between the organizational relate with an external organization: the central government, inter-regional cooperation, linked organ contributors, and the public, the other side, the internal organization is woven in the Department of Labor, Transmigration and Population of East Java province them self. Characteristic patterns of relationship norms implementing agency policies based on the paradigm change and development mission. From the social, economic and political aspect of East Java Province they are highly supported but from transmigration destination areas precisely into the dynamics both at the level of stakeholder and grassroots level. Disposition policies do flows from top to bottom.

Keywords: *Implementation, Policy, Development, Demography, Transmigration.*

I. Pendahuluan

Reformasi 1998 telah menghentikan sama sekali program pembangunan pemerintahan Orde Baru untuk selanjutnya digantikan dengan program pembangunan dalam bentuk hal lain. Reformasi yang bergulir sejak Mei 1998 telah mendorong perubahan pada hampir seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Reformasi selanjutnya telah menuntut perlunya pembaharuan dalam sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara secara nasional. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah merespon tuntutan perubahan ini dengan menetapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perubahan Nasional, dan kini telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 dan No. 40 Tahun 2006. Sebagai akibat dari kebijakan baru dari pemerintahan hasil reformasi maka terjadi perubahan sistem perencanaan pembangunan daerah yang merupakan konsekuensi logis dari agenda reformasi yang beberapa diantaranya adalah demokratisasi dan desentralisasi yang diterapkan pada level pemerintah daerah. Ternyata dua agenda reformasi ini berpengaruh terhadap seluruh sistem perencanaan, strategi, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang ada, termasuk berpengaruh pula terhadap implementasi kebijakan mobilitas kependudukan (ketransmigrasian) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Strategi kebijakan, akan bergantung pada sebuah pilihan paradigma pembangunan suatu daerah. Paradigma, yaitu suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) dari suatu cabang ilmu (Ritzer, 1985) akan mendominasi ilmu tersebut pada waktu tertentu. Sebagai contoh, teori transisi demografi merupakan paradigma yang paling menonjol dalam pemikiran demografi untuk menerangkan peranan pembangunan terhadap penurunan fertilitas (Simmons, 1998). Kajian paradigmatis sebagai upaya untuk menelaah ilmu-ilmu pengetahuan bisa diperlakukan sama untuk kasus ketransmigrasian. Demografi dalam arti sempit didefinisikan sebagai berikut; *"the study of the size, territorial,*

and composition of population, changes therein, and the components of such changes, which may be identified as natality, mortality, territorial movements (migration), and social mobility". Demografi berarti terkait studi tentang ukuran, distribusi teritorial, dan komposisi penduduk, perubahan di dalamnya, dan komponen perubahan tersebut, yang dapat diidentifikasi sebagai taraf kelahiran, kematian, gerakan teritorial (migrasi), dan mobilitas sosial (Hauser and Duncan, 1963). Demografi yang cara pandang dan pendekatannya lebih pada ilmu alamiah dan matematika, dikelola dengan angka-angka, dihitung manusia yang lahir, mati, dan pindah di suatu lokasi dalam jangka waktu tertentu, yang seringkali demografi formal memiliki label sebagai ilmu yang bebas nilai (*value free*).

Dalam perkembangannya demografi didekati oleh cara pandang ilmuwan sosial, sehingga pengertian demografi mengalami perluasan makna menjadi *population studies* (studi kependudukan). Ketika demografi didekati oleh cara pandang ilmuwan ekonomi, maka demografi dimasukkan ke dalam perhitungan ekonomi terutama yang menghubungkan antara pertumbuhan penduduk dan persediaan sumber daya alam yang akhirnya melahirkan teori kependudukan oleh Thomas Malthus. Malthus mendasarkan penyebab perubahan penduduk pada tingkat individual dan mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk menyerupai deret ukur, sedangkan pertumbuhan sumber daya alam (bahan makanan) menyerupai suatu deret hitung. Ketika teori Malthus mendapatkan perlawanan dari Kingsley Davis maka demografi didekati dengan cara pandang ekologis sehingga perubahan kependudukan dihubungkan dengan tingkat struktural atau kolektif. Hal mana diikuti oleh Karl Marx dan kaum sosialis yang optimis dan percaya pada struktural. Di lain pihak, para kapitalis tradisional adalah golongan yang optimis, tetapi percaya pada kekuatan individu. Para penganjur keluarga berencana berpandangan sama dengan Malthus sehingga disebut Neo-Malthusian, tetapi tidak seperti Malthus, mereka menyokong penggunaan alat kontrasepsi untuk menurunkan pertumbuhan penduduk (Hernandez, 1974).

Negeri-negeri pelaksana pembangunan terutama dalam bidang ekonomi memandang bahwa penduduk menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan. Namun cara memandangnya apakah kependudukan sebagai akibat ataukah kependudukan sebagai sebab dari pembangunan ekonomi. (Lean, 1983). Golongan pertama yang memandang kependudukan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi biasa disebut *developmentalist*. Mereka berpandangan bahwa penduduk adalah tujuan pembangunan yang didasarkan pada teori transisi demografi. Teori ini merupakan deskripsi dari penurunan fasilitas yang terjadi di negara barat akibat dari revolusi industri dan modernisasi. Golongan kedua adalah mereka yang memandang bahwa kependudukan merupakan faktor penyebab dari pembangunan ekonomi. Golongan yang biasa disebut *family planners* ini berkeyakinan bahwa penduduk akan menjadi penghambat pembangunan jika pertumbuhannya tidak dikendalikan. Hal

ini berdasarkan pada formula: *Income Perkapita* = GNP: Populasi. Pada sisi lain, penduduk dapat menjadi aset pembangunan jika pertumbuhannya terkendali dan kualitasnya dapat diandalkan. Pandangan bahwa penduduk merupakan beban atau aset (modal) pembangunan menjadi isu sentral para peminat dan ahli demografi di Indonesia saat ini. Dengan kata lain, teori transisi demografi bukanlah topik yang relevan dengan kegiatan pembangunan nasional Indonesia.

Sesungguhnya, orientasi yang relevan adalah bagaimana mentransformasikan penduduk menjadi modal sekaligus aktor pembangunan dan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian demografi akan menjadi menarik, apabila penduduk tidak sekedar diperlakukan sebagai kumpulan angka-angka. Penduduk harus dipandang sebagai himpunan manusia revolusi pemikiran semacam ini telah dimulai oleh bidang kependudukan yang secara ontologis memperkenalkan dimensi baru kependudukan (Dahlan, 1990). Dimensi tersebut meliputi: 1) pengaitan dengan lingkungan, 2) pengaitan dari segi kualitas, dan 3) pandangan utuh terhadap penduduk. Dimensi yang terakhir dapat dilihat dari segi individu, anggota masyarakat, himpunan manusia, dan kaitan dengan pembangunan.

Pembangunan Jawa Timur yang secara esensial bertujuan membangun manusia seutuhnya dan membangun masyarakat Jawa Timur, tentu saja harus menggunakan pola yang dapat membangkitkan inovasi dari saat ke saat. Hal tersebut tentu saja memerlukan fungsi kebijakan dalam posisinya yang berada di depan perubahan posisi kebijakan dalam mobilitas seperti ini ditujukan untuk merubah sekaligus mengarahkan persepsi, sikap dan perilaku penduduk Jawa Timur sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dengan kerangka paradigma seperti itulah kebijakan mobilitas kependudukan di Jawa Timur

Menurut hasil Sensus BPS Tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 237. 641. 326 jiwa. Angka populasi sebesar itu menjadikan Indonesia negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat setelah berturut-turut China, India, dan Amerika Serikat. Selain PBB, badan perbankan dunia World Bank juga menerbitkan rangking negara-negara terpadat di dunia yang diterbitkan pada tahun 2013, dengan posisi Indonesia di urutan ke empat, dengan jumlah populasi mencapai 249,865,631 jiwa.

Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Jumlah penduduk yang tinggi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk. Kebijakan mobilitas kependudukan diperlukan disini dalam peran dan fungsinya sebagai suatu aktivitas perubahan sosial di antara semua penduduk dengan pemerintah, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan mobilitas kependudukan disini juga merupakan berbagai upaya dan cara serta teknik penyampaian perubahan yang berasal dari pihak yang memprakarsai

kebijakan dan diwujudkan kepada penduduk yang menjadi sasaran kebijakan agar dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam kebijakan.

II. Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Lincoln dan Guba dalam *Naturalistic Inquiry* (1985: 70-91) menjelaskan tentang pendekatan penelitian kualitatif. Pertama, secara ontologis penelitian kualitatif ditandai oleh fakta bahwa peneliti mengkonstruksi/membangun realitas yang dia lihat. Kedua, secara epistemologis, penelitian kualitatif didasarkan pada nilai dan judgment nilai, bukan fakta. Dalam pandangan umum di lapangan mereka mengklaim bahwa nilai peneliti memandu dan membentuk simpulan penelitian sebab peneliti membangun realitas dari penelitian. Ketiga, penelitian kualitatif bersifat empiris dan ilmiah sebagaimana peneliti kuantitatif, meskipun dasar-dasar filosofis penelitian kualitatif baik secara ontologism maupun epistemologis dipandu oleh judgment nilai yang subyektif. (Lincoln and Guba, 1985:187-220).

Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan penekanan pada implementasi kebijakan ketrasmigrasian di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2014 pada masyarakat transmigran asal Jawa Timur Periode 2013-2014 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam konteks studi implementasi kebijakan publik. Pemilihan kasus ini dilatarbelakangi oleh kondisi objektif bahwa terjadi implementasi kebijakan ketrasmigrasian di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2014. Hal ini menjadi bagian dalam pelaksanaan studi yang dipelajari. Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami batas studi kasus dalam penelitian ini:

1. Sasaran penelitian dapat berupa manusia, peristiwa, dan dokumen, yaitu para birokrat Bidang Mobilitas Kependudukan, di provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota pengirim, Kabupaten/Kota penerima, pelaksana lapangan Bidang Mobilitas Kependudukan, Satuan Pemukiman dan lain-lain. Masih ditambah lagi dengan peristiwa unik kearifan lokal dalam penanganan kependudukan serta dokumen pendukung terkait.
2. Sasaran-sasaran tersebut adalah ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara fokus dan deskripsi fokus kajian kebijakan pembangunan bidang mobilitas kependudukan khususnya sektor transmigrasi.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur untuk diambil data sejauh mana faktor-faktor pendukung dan penghambat

keberhasilankinerja implementasi kebijakan ketrasmigrasian di Dinas TenagaKerja, Transmigrasi, dan kependudukan Provinsi Jawa Timur Periode 2009-2014. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2016 hingga bulan Mei 2016, mulai dari pengumpulan data lapangan bulan Maret dan pengolahan data/laporan bulan Mei 2016.

Sumber Data

Menurut Cresswell (2012: 261), sumber data penelitian kualitatif bisa dari berbagai sumber (*Multiple sources of data*). Peneliti kualitatif mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian peneliti mereview, memberikan makna dan mengolah semua data kedalam kategori-kategori atau tema-tema yang melintasi semua sumber data. Adapun yang dijadikan sebagai sumber/menghimpun data dalam penelitian ini adalah implementor Bidang Mobilitas Kependudukan di Dinas TenagaKerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dokumen pustaka, interaksi kehidupan antara pelaksana kebijakan dan masyarakat sasaran kebijakan dalam kurun waktu tertentu .

Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dipergunakan tiga macam teknik yaitu:

1. Studi dokumentasi. Dengan teknik ini peneliti berusaha memperoleh data atau informasi dengan cara menggali dan mempelajari dokumen-dokumen, arsip dan catatan yang berhubungan dengan Kebijakan Ketrasmigrasian.
2. Wawancara mendalam. Dengan teknik wawancara tidak berstruktur atau mendalam (*Indepth/unstructured interviewing*) peneliti melakukan tanya jawab dan tukar pikiran tanpa daftar wawancara; peneliti hanya dibantu dengan sejumlah topik umum tentang ketrasmigrasian, penelitian masih harus dikembangkan oleh pewawancara berdasar jawaban informan. Dalam pelaksanaannya, sehingga instrument berupa panduan wawancara tidak diperlukan.
3. Observasi. Dengan teknik pengamatan ini peneliti berusaha memperoleh data visual atau informasi nyata yang ada di lapangan dengan cara memperhatikan dan menangkap peristiwa ataupun kejadian yang berhubungan dengan Kebijakan Ketrasmigrasian.

Teknik analisis data yang digunakan untuk kepentingan pembahasan hasil penelitian ini adalah analisa data kualitatif, membangun pola-pola,kategori-kategori, dan tema-temanya dari bawah ke atas (induktif), dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak (John Cresswell: 2012).

Metode yang dipergunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan model interaktif yaitu semacam siklus terkait antara kegiatan pengumpulan data, penyederhanaan data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Jadi analisa data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Penarikan ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif yang mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berasal dari tinjauan kebijakan ketrasmigrasian di Bidang Mobilitas Penduduk, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, setelah melakukan berbagai observasi dan wawancara serta dokumentasi
- b. Pengumpulan data, terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data tetapi peneliti dapat mengumpulkan data yang berbeda secara bersama.
- c. Analisis data, setelah data terkumpul peneliti dapat memulai mengagregasi, mengorganisasi dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Agregasi merupakan proses mengabstraksikan menjadi umum guna menggunakan pola umum data.

Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus tersebut dapat dilihat berdasarkan perspektif.

- a. Standar dan Sasaran kebijakan;
- b. Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas
- c. Karakteristik agen pelaksana; dan
- d. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
- e. Disposisi implementor

Informan Penelitian

Berdasarkan gambaran permasalahan, fokus dan deskripsi fokus yang ada serta pendekatan penelitian yang digunakan, maka penelitian ini menentukan informan penelitian sebagai berikut:

- a. Implementor Bidang Mobilitas Penduduk Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
- b. Implementor Bidang Mobilitas Kependudukan Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Tulungagung, Jombang, dan Mojokerto.

III. Temuan Penelitian

1. Faktor Komunikasi organisasi di dalam Ketransmigrasian oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur merupakan kebijakan Lintas sektoral tidak hanya melibatkan pelaksana kebijakan di bidang mobilitas kependudukan saja, melainkan organisasi lain mulai dari proses awal analisis kelayakan layak produksi dan layak huni.
2. Faktor karakteristik norma hubungan implementor pada implementasi kebijakan ketransmigrasian oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dengan paradigma baru yakni demokrasi dan desentralisasi ternyata belum lebih baik dari paradigma lama yakni terpusat, masih ada kendala yakni implikasi dari KSAD terhadap politik anggaran dan politik formal serta kepentingan masing masing daerah.
3. Faktor Sumber Daya di dalam Implementasi kebijakan ketransmigrasian oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur belum secara menyeluruh menyediakan prasarana wilayah. Masih terbatas pada penyediaan lahan permukiman, lahan produksi pekarangan, lahan pertanian dan jalan.
4. Faktor aspek sosial, ekonomi dan politik pada Implementasi kebijakan ketransmigrasian oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur masih belum sampai pada pengadaan infrastruktur kesejahteraan masyarakat transmigran seperti prasarana produksi vital yang belum ada yakni irigasi dan sarana air bersih, prasarana perhubungan ke pusat ekonomi kota, pasar, dan instalasi listrik. Fasilitas umum yang disediakan baru terbatas pada Masjid, Puskesmas, Kantor Balai Desa, serta Sekolah Dasar.

IV. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan ketransmigrasian di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur ternyata sudah sesuai dengan faktor-faktor yang mendukung kinerja implementasi kebijakan 3 sebagaimana teori Van Mater dan Van Horn, yang meliputi 1) standar dan kebijakan; 2) sumberdaya; 3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; 4) karakteristik agen pelaksana; 5) kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan 6) disposisi implementor.
2. Faktor-faktor yang mendukung kinerja implementasi kebijakan ketransmigrasian di Dinas tenaga kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Periode 2009-2014 ternyata meliputi:
 - a. Sasaran strategis di Bidang Ketransmigrasian, yakni mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha,

- layak berkembang dan layak huni. Meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan kemandirian transmigran. Standar berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Ketrasmigrasian berupa penempatan transmigran yang telah mendapat pelatihan (Kepala Keluarga), dan transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosial (Kepala Keluarga).
- b. Sumber daya dalam implementasi kebijakan ketrasmigrasian Jawa Timur didukung oleh sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non-manusia (*non-human resources*).
 - c. Komunikasi antara organisasi dalam implementasi kebijakan ketrasmigrasian Jawa Timur dilakukan dengan menjalin hubungan antara Bidang Mobilitas Penduduk Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dengan organisasi Pemerintah Pusat, dengan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pengirim, dengan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tujuan, dengan organisasi Pendukung, dengan internal organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
 - d. Karakteristik norma pola hubungan agen pelaksana kebijakan ketrasmigrasian Jawa Timur didasarkan pada perubahan paradigma transmigrasi dari centralistik otoritarian ke desentralistik demokratis, juga disesuaikan dengan Misi Pembangunan Berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*).
 - e. Dari aspek sosial, ekonomi dan politik pelaksanaan kebijakan ketrasmigrasian ini dari sisi Jawa Timur sangat terdukung namun dari sisi kondisi sosial, ekonomi dan politik daerah tujuan transmigrasi justru menjadi dinamika baik pada level pemangku kepentingan maupun level masyarakat bawah.
 - f. Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan ketrasmigrasian Jawa Timur ini diberikan secara berantai dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur kepada Kepala Bidang Mobilitas Penduduk, Kepala Seksi Penyiapan Pendaftaran dan Seleksi, Seleksi Pelayanan Transmigrasi, Pengolah Data Penataan Penduduk.
3. Model implementasi kebijakan ketrasmigrasian di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Periode 2009-2014 ternyata masih belum sepenuhnya sama persis dengan model implementasi kebijakan dari Van Meter and Van Horn. Perbedaan tersebut terdapat pada belum adanya saling keterhubungan di antara faktor-faktor pendukung kinerja, yang ada hanya hubungan faktor-faktor tersebut secara langsung ke arah kinerja implementasi kebijakan ketrasmigrasian di Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Periode 2009-2014, terdapat adanya faktor kerjasama antar daerah.

V. Rekomendasi

Hal-hal yang dapat disarankan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya kinerja implementasi kebijakan ketransmigrasian di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Periode 2009-2014 yang secara teori Van Meter dan Van Horn, adalah meliputi (1) standard an sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; 4) karakteristik agen pelaksana; 5) kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan 6) disposisi implementor, (7) Kerjasama Antar Daerah, agar dapat disesuaikan bukan hanya faktor-faktor pendukung ke arah kinerja implementasinya saja, tetapi juga berhubungan di antara faktor-faktor pendukung satu sama lainnya
2. Aspek-aspek yang belum terungkap dalam penelitian ini sebaiknya ditindaklanjuti oleh penelitian sejenis di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ahmad Erani Yustika, (2002) *Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Alvin Toffler, (1980) *The Third Wave*, London: Pan Books Ltd. UNSCTD.
- Budiman, Arief. (2000) *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta. Gramedia Pustaka.
- Carl J. Friedrich, (1963) *Man and His Government*, New York: Mc Graw Hill.
- Charles O Jones, (1970) *An Introduction to the Study of Public Policy*, Belmont, CA: Wadsworth.
- Charles R. Berger dan Steven H. Chaffee, (1987) *Handbook of Communication Science*, Professional Book, Beverly. Hills, CA: Sage.
- Chief J.O. Udoji, (1981) *The African Public Servant as a Public Policy in Africa*,. Addis Abeba: African Association for Public Administration and Management.
- Colin Cherry, (1971) *On Human Communication World communication: threat or promise?: A socio-technical approach*. Author, Colin Cherry. Publisher, Wiley-Interscience.
- Daniel Lerner, (1958) *The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East*. New York: Free Press.
- David Easton, (1953) *The Political System*, New York: Knopf.

- Donald Van Meter, dan Carl Van Horn, (1975) "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in Administration and Society". Beverly Hills: Sage Publication.
- Emil Salim, (1971) Penerangan dan Pembangunan, 239/Bapp/DI/3/1971.
- Fadillah, (2001) Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta, Sinar Grafika.
- Fakih, Mansour, (2001) Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Insist Press.
- Finsterbusch, K. and A.B. Motz, (1980) Social Research for Policy Decision. Wads-worth Publishing Company.
- George C. Edwards III & Ira Sharkansky, (1978) The Policy Predicament, San Fransisco: W.H. Freeman and Company.
- Grindle, Merilee S., (1980) Politics and Policy Implementation in the Third World, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
- Harlan Cleveland, Mochtar Lubis; penerjemah Ricardo Iwan Yatim, (1990) Masa depan pembangunan Penerbit: Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Harmoko, (1985) Komunikasi Sambung Rasa, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan, (1970) Power and Society, New Haven: Yale University Press.
- Hedebro dalam Nasution, Zulkarimein, (2004) Komunikasi Pembangunan, Raja Grafindo Persada, Jakarta:102-103.
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn, (1986) Policy Analysis for the Real. World, Oxford University Press.
- H.Paskah Suzetta, (2007) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Perencanaan Pembangunan Indonesia, Kamis, 22 Maret.
- Hovland, C. I., (1948) Psychology of the communication process. In W. Schramm (Ed.), Communications in modern society. Urbana, Ill.: Univ. Ill. Press, 1948.
- James E. Anderson, (1979) Public Policy Making, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- John Naisbitt, (1982) Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives, New York: Warner Books.
- Marshall Mc. Luhan, (1964) Understanding Media: Extension of A Man, USA: A Signet Book.
- Masanao, Toda., (1967) About the Notions of Communication and Structure. In: Communication. Concept and Perspectives, Thayer, L. (Ed.), London.
- M Irfan Islamy, (2007) Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Cetakan Keempat belas, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, (1983) Implementation and Public Policy, New Jersey: Scott Foresman and Company, USA.

- Nasution, Zulkarimen., (2002) *Komunikasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nigro, A. Felix and G. Liyd Nigro, (1984) *Modern Public Administration*, New York: Harper International Edition.
- Nugraha Setiawan, (1994) *Transmigrasi di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Program Studi Kependudukan, Program Pascasarjana UGM.
- Rahmat, Jalaluddin., (1999) *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta.
- Rosyadi, Slamet., (2010) *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Gava Media, Yogyakarta.
- Samudra, Wibawa, Dkk, (1994) *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, (1992) *Analisa Kebijakan Publik*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Semma, (2008) *Sejarah Pers di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Soeryono Soekanto, Soleman B, (1985) *Pengantar Konsep dan Teori Sosiologis*, Universitas Lampung.
- Solichin Abdul Wahab., (2002) *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Stappers, James G, (1984) *De eigen aard van televisie; tien stellingen over cultivatie en culturele indicatoren*. Massacommunicatie. Nijmegen, Netherlands: XII (5-6), (Television's specific nature; ten theses on cultivation and C.I.).
- Thomas R. Dye, (1953) *The Political System*, New York: Knopf.
- _____, (1992) *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood. Cliffs.
- United Nations Development Program, (1995) *Human Development Report*.
- Widodo, Joko, (2007) *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Wilbur Schramm, (1964) *Mass Media and National Development* was published by Stanford University Press and Unesco.
- W.I. Jenkins, (1978) *Public Analysis*, Oxford: Martin Robertson.
- William N. Dunn, (2000) *Analisis Kebijakan Publik*, Gajah mada University Perss, 132.
- _____, (2004) *Public Policy Analysis: An Introduction*. 2st. Ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice-Hall.

Sumber Jurnal Ilmiah:

Alex Gode, 1959, "What is Communication?" *Journal of Communication* 9:5, 1959.

- Andreas Riege Nicholas Lindsay, (2006), "Knowledge management in the public sector: stakeholder partnerships in the public policy development", *Journal of Knowledge Management*, Vol. 10 Iss 3 pp. 24 – 39
- Baiba Petersone , (2013), "The role of public relations in foreign policy planning and execution", *Journal of Communication Management*, Vol. 17 Iss 4 pp. 308 - 323
- Barry Moule Lina Giavara, (1995), "Policies, procedures and standards", *Information Management & Computer Security*, Vol. 3 Iss 3 pp.7–16
- Chunyan Du Yacheng Xiao Weiyin Lv , (2014), "Performance evaluation of the science and technology policy in Chongqing", *Journal of Science and Technology Policy Management*, Vol. 5 Iss 2 pp. 122 – 135
- Christopher L. Atkinson , (2014), "Public policy processes and the environment: implications for a sustainable future", *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, Vol. 5 Iss 4 pp. 457 – 475
- Dean Kruckeberg Marina Vujnovic, (2005), "Public relations, not propaganda, for US public diplomacy in a post-9/11 world: Challenges and opportunities", *Journal of Communication Management*, Vol. 9 Iss 4 pp. 296 – 304
- De Sola Pool, I. (1974) The rise of communications policy research. *Journal of Communications*, 24(2), 31-42, 1974.
- Evanthia Kalpazidou Schmidt, (2008), "Research management and policy: incentives and obstacles to a better public-private interaction", *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 21 Iss 6 pp. 623 -636
- Frank Dance, (2000) The 'concept' of communication, *Journal of Communication* 1970, published by Mercentile Press.
- Giuditta de Prato Jean Paul Simon , (2014), "Public policies and government interventions in the book publishing industry", *Info*, Vol. 16 Iss 2 pp. 47 – 66
- Jun-Zhao Sun Jukka Riekkı Jaakko Sauvola Marko Jurmu, (2007), "Policy mechanism and evaluation algorithm for connectivity management adaptability", *International Journal of Pervasive Computing and Communications*, Vol. 3 Iss 1 pp. 57 – 81
- José-Luis Gómez-Barroso Claudio Feijóo, (2009), "Policy tools for public involvement in the deployment of next generation communications", *info*, Vol. 11 Iss 6 pp. 3 – 13
- Karen Donders, (2010), "The benefits of introducing European competition principles into national public broadcasting policy", *info*, Vol. 12 Iss 6 pp. 56 – 68
- Lizette Weilbach Elaine Byrne, (2013), "Implementing open source software to conform to national policy", *Journal of Systems and Information Technology*, Vol. 15 Iss 1 pp. 78 – 96

- Lok Sang Ho, (2000), "The nature of optimal public policy", *International Journal of Social Economics*, Vol. 27 Iss 7/8/9/10 pp. 1013 – 1019
- M. Alwi Dahlan, (1983) *Pengawasan Pembangunan*, Majalah Prisma, No.2, Pebruari.
- Marco Caliendo Armin Falk Lutz C. Kaiser Hilmar Schneider Arne Uhlenborff Gerard van den Berg Klaus F. Zimmermann, (2011), "The IZA Evaluation Dataset: towards evidence-based labor policy making", *International Journal of Manpower*, Vol. 32 Iss 7 pp. 731 – 752
- Martijn Poel Andrea Renda Pieter Ballon, (2007), "Business model analysis as a new tool for policy evaluation: policies for digital content platforms", *info*, Vol. 9 Iss 5 pp. 86 – 100
- Michael G. Wells, (2000), "Business process re-engineering implementations using Internet technology", *Business Process Management Journal*, Vol. 6 Iss 2 pp. 164 – 184
- Michael Kennedy, (2011), "Cybernetics and system dynamics: impacts on public policy", *Kybernetes*, Vol. 40, Iss 1/2 pp. 124 – 140
- Nafisa Priti Sanga Rajeev Kumar Ranjan , (2015), "Scope of policy convergence approach to freshwater management in rural Jharkhand", *World Journal of Science, Technology and Sustainable Development*, Vol. 12 Iss 2 pp. 129 – 147
- Philip J. Lazarus John Kalafat, (2001), "Suicide prevention and youth: recommendations for public policy", *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 21 Iss 3 pp. 22 – 37
- Rebecca Eposi Ngeve, Buea Cameroon, and Rogers Tabe Egbe Orock, In the name of "development": ethnic politics and multicultural public policy in Cameroon, *International Journal of Sociology and Social Policy*, Volume 32, Issue 3/4
- Rosemary Burnley, (1998), "International publicity: concepts and applications", *Marketing Intelligence & Planning*, Vol. 16 Iss 2 pp. 107 – 113
- Samuel R. Staley, (2006), "Institutional considerations for sustainable development policy implementation", *Property Management*, Vol. 24 Iss 3 pp. 232 – 250
- Simon Alvey, (2000), "Social exclusion and public sector housing policy in Scotland", *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 20 Iss 5/6 pp. 72 – 94
- Stevens, (1950) Introduction: A Definition of Communication, *The Journal of the Acoustical Society of America*, XXII November, 689. 1950.
- Wang Xing-fen Li Yi-jun, (2004), "Formal definition and implementation of business-oriented SoD access control policy", *Information Management & Computer Security*, Vol. 12 Iss 5 pp. 379 – 388
- William P. Anderson, (2012), "Public policy in a cross-border economic region", *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 25 Iss 6/7 pp. 492 – 499

Yvonne Brunetto Rod Farr-Wharton, (2005), "The role of management post-NPM in the implementation of new policies affecting police officers' practices", *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, Vol. 28 Iss 2 pp. 221 – 241

Zerrin Kenanoğlu Özlem Karahan, (2002), "Policy implementations for organic agriculture in Turkey", *British Food Journal*, Vol. 104 Iss 3/4/5 pp. 300 – 318

Sumber Internet:

Masyarakat Adat Dayak, 2014, *9 Juta Hektar Lahan Disiapkan untuk Transmigran* Menteri Marwan Akui Transmigrasi Picu Adanya Konflik <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150512164252-20-52850/menteri-marwan-akui-transmigrasi-picu-adanya-konflik/>

Oyos Sarosa. HN, (2014) *Sejarah Transmigrasi di Lampung: Mereka Datang dari Bagelen*, <http://www.teraslampung.com/sejarah-kolonisasi-di-lampung-mereka/>

Kaltimpost, (2014), *The Borneo izinland*, <http://kaltim.prokal.co/read/news/114309-the-borneo-izinland>.

Sumber Aturan Perundangan:

Republik Indonesia, (1945), *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.

_____, (1997), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian*.

_____, (2009), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian*.

Presiden Republik Indonesia, (1999) *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi*

_____, (1960) *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1960 tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa*

_____, (1994) *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan*

Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, (1990) *Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 124/Men/1990 tentang Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi*

Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia, (1997) *Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor: 93/Men/1997 tentang Pemberian Bantuan Peralatan dan Jaminan Hidup Bagi Transmigran*

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.11/Men/II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor: 93/Men/1997 tentang Pemberian Bantuan Peralatan dan Jaminan Hidup Bagi Transmigran

_____, (2008) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.29/Men/XII/2008 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2009

_____, (2007) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.214/Men/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi

Provinsi Jawa Timur, (2013) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Transmigrasi